

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, D. M. (2009). Hukum Perkawinan. PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, M. (2013). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyani, D. T. (2020). HUKUM PERKAWINAN (Salmah, Khalidawati, & Halimatus, Eds.). UMM Press.
- Dewata, N. F. M., & Achmad, Y. (2013). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. PUSTAKA PELAJAR.
- Isnaeni, M. (2016). Hukum Perkawinan Indonesia (Atif, Falah, & Nurul, Eds.). PT Refika Aditama.
- James, D. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan (D. J, Ed.). Antropologi Indonesia.
- Marzuki, M. P. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. Kencana.
- Mufid, M. (2012). Etika dan Filsafat Komunikasi. Prenada Media.
- Naily, N., Nadhifah, N. A., Rohman, H., & Amin, M. (2019). Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Prenadamedia Group.
- Setiadi, M. , E., & Usman, K. (2013). Pengantar Sosiologi Politik (1st ed.). Prenada Media Group.

Setiyowati. (2021). HUKUM PERRKAWINAN DI INDONESIA Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan Berbasis Nilai Keadilan. Setara Press.

Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2018). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif (1st ed.). Alfabeta.

Sukardi. (2020). RESTORATIVE JUSTICE Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia (Yayat, Ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Sunggono, B. (2016). Metodologi Penelitian Hukum . Raja Grafindo Persada.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
7. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam

C. SUMBER LAIN

- Ainul Yaqin, N. (2022). Hak Istri untuk Menolak Dipoligami: Musyawarah dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Baqarah (2): 233. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2(1), 23–46. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i1.25>
- Aji, P. P. (2019). Instagram Sebagai Sarana Untuk Menunjukkan Eksistensi Diri Di Kalangan Mahasiswa Uny. *Pendidikan Sosiologi* , 1, 6.
- Ananda. (2024, April 3). Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Gramedia Blog*. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>
- Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN TRANSPORTASI ONLINE. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 205. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.205-244>

- Bachri, S. (2020). Kewenangan kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19(1), 1026–1039. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v1i1.878>
- Faizal, L. (2016). Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2).
- Hutomo, D. (2021, December 6). Tugas Jaksa dalam Perkara Perdata dan TUN. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-jaksa-dalam-perkara-perdata-dan-tun-lt5b8ac09e79dbb/>
- Ismail, H. N. (2007). Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik. *HUMA Dan Magister Hukum UGM*.
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05>
- Jarbi, M. (2014). Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Pendidikan Agama Islam*, 1, 1, 56–58.
- Kusmiati, Nur. I. (2016). UNDUE INFLUENCE SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB CACAT KEHENDAK DILUAR KUHPERDATA, DALAM UPAYA MENGISI KEKOSONGAN HUKUM. *LITIGASI*, 17(1), 3–28.
<https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i1.97>
- Lesmana, T. C. (2024, April 3). Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum Dalam Persepektif Ilmu Sosial. *Nusa Putra University*.
<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu->

- Nugraha, Y. (2020). Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan. *Veritas et Justitia*, 6(1), 213–236.
- Ramadhani, G. S. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 16(1), 77–91. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898>
- Rodliyah, N. (2013). Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Menurut . *Pranata Hukum*, 8, 26. <https://media.neliti.com/media/publications/26714-ID-pencatatan-pernikahan-dan-akta-nikah-sebagai-legalitas-pernikahan-menurut-kompil.pdf>
- Sinuhaji, Z. B. Y., Budiono, A. R., & Effendi, L. (2015). Persekutuan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Prinsip Kemandirian Notaris. *Jurnal Publikasi*.
- Sitinjak, I. Y. (2018). Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 3(3).